

BAB.I

PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK

A. Defenisi Komunikasi

Komunikasi secara sederhana dapat defenisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui/ tanpa media yang menimbulkan akibat tertntu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan meghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disamapaikan. Menurut Thomas M. Scheiwadael dalam Mulyana (2001), mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak social dengan orang sekitar dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, dan berprilaku seperti uang diinginkan.

Menurut Seiler (dalam Arni, 2007) ada empat prinsip dasar dalam berkomunikasi yaitu :

1. Komunikasi adalah suatu proses, artinya bersifat dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan.
2. Komunikasi adalah system, artinya bahwa komunikasi terdiri atas beberapa komponrn yang mempunyai tugas masing-masing dan berkaitan satu sama lain.
3. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, artinya ada proses saling tukas komunikasi
4. Komunikasi dapat terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Terjadi disenagaj apabila pesan yang mempunyai maksud tertntu dikirimkan kepada penerima yang dituju, sedangkan situasi

komunikasi yang tidak sengaja dapat diterima oleh orang lain dengan sengaja.

Menurut Wahyu (2010) komponen komunikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Komunikator (sender atau sumber) adalah sumber informasi yang menciptakan pesan sekaligus menyampaikan pesan kepada khalayak dengan menggunakan saluran komunikasi dan media massa.
- 2) Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambing. Artinya informasi yang merupakan isi (content) yang akan disampaikan atau didistribusikan oleh komunikator melalui saluran dan media komunikasi yang sesuai dengan pertimbangan dan tujuan komunikator, isi pesan beragam seperti berita, informasi umum, iklan, film, hiburan dll.
- 3) Media, sarana atau saluran yang mendukung pesan. Media sebagai sarana atau instrument yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan dalam beragam bentuk kepada khalayak. Media dengan karakteristik yang dimilikinya mampu menjangkau khalayak dalam jumlah yang banyak, serempak, cepat dan mampu menghasilkan efek, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Khalayak adalah pihak yang menerima pesan dan menjadi sasaran yang dikirimkan oleh komunikator. Khalayak merupakan target dari beragam bentuk pesan sekaligus pihak yang memahami serta memaknai pesan. Pemaknaan khalayak

oleh khalayak mampu menimbulkan feedback dan pengaruh dalam proses komunikasi.

- 5) Efek atau dampak sebagai pengaruh pesan. Efek dalam proses komunikasi merupakan ukuran antara yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima pesan dan setelah mengalami distribusi pesan. Pengaruh dapat dilihat dalam bentuk pikiran, perasaan ataupun perilaku yang muncul setelah khalayak menerima pesan. Pengaruh itu berbentuk efek, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
- 6) Umpan balik merupakan tindakan yang muncul setelah efek komunikasi berlangsung pada khalayak penerima pesan, umpan balik diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah pesan yang didistribusikan, umpan balik juga dapat diartikan sebagai reaksi atau respon.

2. Defenisi Ilmu Politik

Menurut Meriam Budardjo Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik dapat di pahami dalam prespektif Negara, kekuasaan kebijakan umum, dan pengambilan keputusan, serta alokasi atau distribusi.

Pada prsepektuif Negara menurut Rogers F. Soltau (1961:99) Ilmu politik mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta dengan dengan Negara-negara lain. Menurut J. Barends ilmu politik adalah ilmu yang memplajari Negara dan bagaimana Negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.

Dalam prespektif kekuasaan menurut Harold Laswel dan Abraham Kaplan (1986) Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian

kekuasaan. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehiduannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Menurut Robson, ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Hal ini juga di fokuskan pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, itu.

Pada prespektif pengambilan keputusan menurut Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan keputusan umum untuk masyarakat seluruhnya. Sedangkan menurut Karl W. Deutsch politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum . Keputusan semacam ini berbeda dengan keputusan pribadi oleh seseorang dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sector public.

Prespektif politik dari aspek kebijakan umum, dikemukakan oleh Hoogerwerf bahwa, obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang di maksud dengan kebijakan umum (public policy) di sini adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan . Sedangkan menurut David Easton,, Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Menurutnya kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima untuk suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu.

Prespektif pembagian (distributions) alokasi, menurut D. Harold Laswell, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.

Sedangkan menurut David Easton system politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif (berdasarkan wewenang untuk dan atau atas nama masyarakat).

Menurut Andrew Heywood, politik dapat dimaknai sebagai seni pemerintahan, urusan public, kompromi dan consensus, serta politik sebagai kekuasaan. Kata politik berasal dari kata polis atau kota praja, masyarakat Yunani terbagi menjadi Negara-negara kota yang independen, masing-masing memiliki system pemerintahannya sendiri. Politik dalam konteks ini dipahami sebagai Negara. Mempelajari politik pada intinya mempelajari pemerintahan, atau lebih luas yaitu mempelajari penyelenggara kekuasaan. Politik adalah apa yang berlangsung dalam mesin pemerintahan. Politik pada intinya di praktekkan dalam ruang kabinet, kamar legeslatif, departemen pemerintahan dan yang sejenisnya. Dan yang terlibat didalamnya adalah kelompok masyarakat yang terbatas dan spesifik terutama para politisi

Sedangkan politik sebagai urusan publik sebagaimana di katakana oleh Aristoteles bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan yang berpolitik maksudnya hanyalah didalam sebuah masyarakat yang berpolitik umat manusia dapat menjalani sebuah kehidupan yang baik. Politik dapat dimaknai sebagai sebuah aktifitas etis yang berkenaan dengan usaha menciptakan sebuah masyarakat yang adil atau yang namakan ilmu pemerintahan pokok Perbedaan tradisional antara lingkup public dan lingkup prihat sesuai dengan pembagian antara Negara dan masyarakat sipil. Lembaga – lembaga Negara (perangkat pemerintahan, pengadilan, polisi, tentara, system keamanan social, dan sebagainya) dapat dianggap sebagai public dalam pengertian bahwa mereka bertanggungjawab untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan belanja public. Berbeda dengan masyarakat sipil yang terdiri dari keluarga, perusahaan pribadi atau swasta,

serikat pekerja, kelompok kemasyarakatan dll. Adalah privat karena mereka dibentuk dan dibiayai secara pribadi.

Politik sebagai konflik dan consensus, dapat dipahami bahwa politik adalah sebuah cara untuk memecahkan konflik yaitu dengan kompromi, perdamaian dan negosiasi, dari pada melalui kekerasan atau dengan menggunakan senjata. Salah satu pendukung pandangan ini adalah Bernard Crick (dalam Heywood, 2014:13) yang mengatakan bahwa politik adalah aktivitas dimana kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit pemerintahan tertentu, didamaikan dengan memberi mereka bagian dalam kekuasaan sebanding dengan dengan peran mereka bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh masyarakat.

C, Defenisi Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik.

Gabriel Almon berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik.

Meriam Budiardjo (1982) memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu meyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuangkan menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik di bagi dalam dua dimensi yaitu kegiatan politik, penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kedua, kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam system politik.

Menurut Susanto, komunikasi politik adalah komunikasi politik yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengingat semua warganya melalui sangsi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Nimmo berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif, yang pengatur perbuatan-perbuatan mereka dalam konflik social.

Menurut McQuail dalam Swanson 1990 komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Karena itulah komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang dikalaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik. dan sering di kaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu (elections

campaign), karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media masa sebagai alat kampanye.

Menurut Luciana Pye, antara komunikasi dan politik atau pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (domain) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Glanor misalnya mengatakan bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik. Dalam pandangan Pye, bahwa tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (enlarging) dan melipatgandakan (magnifying) dan pilihan-pilihan individual, maka tidak akan ada namanya politik.

Beberapa definisi komunikasi politik yang bersifat linier menurut Lasswell adalah :

1. Transmisi informasi (secara luas mencakup verbal, nonverbal, perilaku, dsb) dalam mengejar kekuasaan (Sunshine Hilligus).
2. Transfer informasi apapun mengenai perlombaan atas sumber daya (Bruce Hardy)
3. Produksi, transmisi dan efek informasi mengenai politik, pendapat politik dan kebijakan publik. (Bob Lichter)

Definisi komunikasi politik yang bersifat sistematis (lihat Alfian, 1991, Wahyuni 2007) mengasumsikan realitas komunikasi politik sebagai sebuah system yang konstan, teratur dan dapat diramalkan misalnya sebagai :

- Pertukaran informasi mengenai pelaksanaan kekuasaan (Ken Goldstein)

- Interaksi antar elite, media warga negara mengenai topic-topik yang berkaitan dengan politik (Talia Stroud)
- Pertukaran gagasan dan pesan, verbal atau visual, secara langsung atau bermedia, dalam suatu ruang publik yang dapat diidentifikasi, yang tujuannya atau konsekwensiinya adalah untuk mengubah struktur dan produk pemerintahan atau menghindari perubahan tersebut. (Lynn sanders)

BAB. II

MEDIA DAN POLITIK

A. Berbagai Teori Komunikasi

Dari berbagai riset social yang pernah di lakukan, ternyata media memainkan peranan sentral dalam aktifitas politik. Hasil penelitian Dominik (1972) membuktikan bahwa dari 15 sumber informasi politik yang tanyakan responden, ternyata ada 10 sumber yang di peroleh dari media dan selebihnya dari sumber yang lain. Melalui media masa bisa diketahui berbagai aktivitas para politisi, pikiran-pikirannya, berbagai pernyataan yang disampaikan, siapa yang menang dan siapa yang kalah, bagaiman strategi lawan politik, berapa besar anggaran yang dihabiskan pada saat kampanye, bagaimana peformen kandidat apa yang disamapikan pada masyarakat, bagaimana kemampuan debatnya dsb. Menurut Jackson orang yang banyak mengikuti media memiliki perhatian yang tinggi terhadap aktivitas politik. Terdapat berbagai teori komunikasi yang dapat dijadikan acuan untuk melihat keperkasaan media dan kelemahan-kemahannya mempersuasi masyarakat dalam hubungannya dengan aktivitas politik diantaranya adalah :

1. Teori Jarum Suntik

Teori ini diangkat setelah melihat keberhasilan medium radio dan media cetak sebagai alat propaganda dalam perang dunia I, serta keberhasilan drama radio Orson Walles yang megisahkan turunya makhluk mars keatas bumi yang di dramatisir sehingga membuat penduduk di sejumlah kota Amerika Serikat jadi gempar. Teori jarum suntik berpendapat bahwa khalayak samaskali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan melalui media komunikasi. Khalayak terlena seperti kemasukan obat bius melalau jarum suntik, sehingga tidak bisa memiliki alternative untuk menentukan pilihan lain kecuali apa yang disiarkan oleh media, teori ini juga dikenal sebagai teori peluru(bullet theory).

2. Teori Kepala Batu (Obstinate Audience)

Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu ada kemampuan untuk menyeleksi apa saja yang berasal dari luar. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik atau teori peluru dengan alasan, jika suatu informasi ditembakkan dari media, mengapa khalayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari tembakan informasi itu. Masyarakat atau khalayak memiliki hak untuk memilah informasi mana yang mereka perlukan dan informasi mana yang tidak di perlukan. Kemampuan untuk menyelkesi informasi ada pada khalayak menurut perbedaan invidu, presepsi dan latar belakang social budaya.

Perbedaan invidu, bahwa anak-anak cenderung lebih senang menonton film karton sementara perempuan lebih senang menonton senentron atau telenovela. Perbedaan presepsi diakibatkan oleh pengalaman invidu, misalnya usia dan factor-faktor psikologi turut menentukan jenis bacaan dalam suart kabat maupun jenis tayangan dalam televise. Perbedaan social budaya dapat di lihat dari segi pendidikan, ekonomi,, etnis, agama, dan kedudukan dalam masyarakat. Orang yang berpendidikan cenderung lebih sering membaca surat kabar yang memiliki banyak ulasan, demikian juga halnya menonton televise lebih senang pada siaran berita dari pada hiduran.

3. Teori Kegunaan dan Kepuasan (Uses and Gratification Theory)

Teori ini di perkenalkan oleh Herbert blumer dan Elihu Katz 1974, teori ini banayak berkaiatan dengan sikap dan prilaku pada konsumen, bagaimana mereka menggunakan media untuk mencari informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Dalam praktek politik teori ini banayak di gunakan oleh para politisi. Misalnya Bill Clinton mempelajari cara debat Kenedy ketika debat dengan Bush dalam pemelihan Presiden Amerika Tahun 1992. Selaian itu di gedung-gedung parlemen banyak anggota DPR membaca dan mengikuti informasi dari media hasil liputan para wartawan. Politisi menggunakan mata dan hati untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, sekaligus menjadikan media sebagai pengganti partai untuk

berhubungan dengan masyarakat dan para konstituennya.. Namun, dibalik itu orang bisa belajar dan mengambil manfaat dari media.

4. Teori Lingkar Kesunyian (Spiral of Silence Theory)

Teori ini di perkenalkan oleh Elizabet Nuelle Neumman, mantan jurnalis kemudian menjadi Profesor emeritus pada salah satu institute publistik di Jerman. Teori bnayak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membuat opini publik, tetapi dibalik itu ada opini yang bersifat laten yang berkembnag di tingkat bawah yang tersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifest (nyata di permukaan). Opini publik yang tersembunyi disebut opini yang berada dalam lingkaran keheningan (the spiral of the silenca). Mislanya di Indonesia di masa pemerinatah Presiden Soeharto, menjelang kejatuhannya banyak opini publik yang berkembnag di tingkat bawah yang bertentangan dengan opini publik mayoritas.

5. Teori Penanaman (Cultivation Theory)

Teori penanaman atau kultivasi (cultivation theory) menggambarkan kehebatan media terutama televi dalam menanamkan sesuatu dalam jiwa penonton, kemudian terimplemntasi dalam sikap dan prilaku mereka.. Misalnya kebiasaan televise menyiarkan berita atau filem tentang kejahatan memberi pengaruh pada sikap dan prilkau penonton untuk tidak mau keluar pada malam hari tanpa ditemani oleh orang lain. Kasus banyaknya tindakan criminal yang di lakukan oleh anak-anak muda di Anerika Serikat pernah di teliti oleh poisi dan para ahli psikologi. Dari hasil riset tersebut di peroleh data bahwa banyak tindakan kejahatan di timbulkan oleh ulah anak-anak yang pernah menjadi pecandu filem kekerasan di usia kanak-kanaknya. Di bidang politik mislnya, tepri memiliki pengaruh yang besar bagi para peninton dengan menggambarkan dalam jiwa dan sikap dan prilaku mereka bahwa partai politik yang banyak tampil di televise diasosiasikan sebagai parpol besar dan berpengaruh, seklaipun dalam kampanye cameramen televise merekayasa dengan hanya meliput tempat-tempat

kerumunan masa. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilih.

6. Teori Agenda Setting (Agenda Setting Theory)

Teori agenda setting pertama kali di perkenalkan pada tahun 1973 oleh Maxwell Mc Combs dan Donald L. Shaw. Mereka tertarik untuk melihat apakah pendapat para pemilih mengenai isu-isu yang di pandang sangat penting dibentuk oleh besarnya pemberitaan mengenai isu-isu tersebut. Dari hasil riset untuk menemukan bahwa adanya korekasi yang signifikan antara isu yang diangkat oleh media dengan isu yang dianggap penting oleh pemilih. Teori ini menegaskan bahwa media memberi pengaruh terhadap khlayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra maupun penampilan kandidat itu sendiri. Meningkatnya penonjolan atas isu yang berbeda bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap opini publik. dalam konteks politik, partai-partai politik dan para aktor politik akan berusaha mempengaruhi agenda media untuk mengarahkan pendapat umum dalam pembentukan image (citra). Dengan menonjolkan isu, citra dan karakteristik tertentu kandidat, media ikut memberikan sumbangan yang signifikan dalam melakukan konstruksi persepsi publik dalam pengambilan keputusan, apakah akan ikut memilih dan apa yang akan di pilih.

B. Hubungan Media dengan Politisi dan Pemerintah

Hubungan antara media dengan politisi atau pemerintah sudah berjalan sekian lama, dan hubungan ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, bukan saja karena wartawan membutuhkan para politisi atau pejabat pemerintah sebagai sumber informasi tetapi juga para politisi atau pejabat pemerintah memerlukan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya maupun kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak. Tidak heran jika para wartawan sering tampak bergerombol didepan gedung istana negara, parlemen, kantor kementerian, kantor gubernur, dan kantor bupati menunggu kesempatan untuk mewawancarai para politisi atau pejabat tersebut. Selain dengan cara itu para politisi atau pejabat pemerintah sering kali mengundang para wartawan

untuk makan malam, berkunjung ke proyek atau dia sendiri berkunjung ke kantor redaksi untuk di wawancarai dan dipublikasikan.

Hubungan yang kurang harmonis antara media dan pemerintah dapat dilihat dari berbagai kasus diberbagai negara adalah sebagai berikut :

1. Di Prancis para wartawan tidak bisa melaksanakan investigasi reporting karena takut pemerintah akan melakukan tindakan balasan untuk menekan media. Ketika media mengungkap skandal almarhum Presiden Prancis Francois Mitterand yang punya anak di luar nikah , rakyat Prancis jadi marah dan tidak senang pada pers yang terlalu bebas dalam mengungkap hal-hal yang pribadi pemimpin negara.
2. Di Inggris ada code of Condict yang dikeluarkan pada 19 Agustus 1997 tentang sanksi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh para wartawan , serta di berlakukannya kode etik jurnalistik yang paling keras dalam sejarah Inggris sejak 1 Januari 1998.
3. Di Jepang media tidak boleh mengekspos kesehatan Kaisar Hirohito
4. Di Korea Selatan pada tahun 1957 ada 60% dari 42 surat kabar harian anti pemerintah , dan ketika terjadi pembunuhan Presiden Park Chung hee (oktober 1979), tokoh yang mengantar Korea memasuki modernisasi, telah terjadi pengekan pers dimana banyak sekali surat kabar di tutup, organisasi pers di larang.

Terkait dengan penggunaan media oleh para politisi dan pejabat pemerintah, terutama media social terutama dalam meningkatkan citra dari politisi khususnya melalui kampanye politik, menjelang pemilihan legislatif di Pusat dan didaerah , pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , dan bahkan menjelang pemilihan kepala daerah seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Sebagaimana di katakana oleh Susanto, 2011 bahwa biaya iklan pemilu tahun 2004 mencapai sekita 400 meliar, dan biaya iklan pemilu tahun 2009 bernilai 2.154 triliun.

Hubungan antara media dengan lembaga-lembaga pemerintahan juga terlihat pada peran media sebagai control social yang selalu mengontrol dan mengawasi berbagai implementasi kebijakan dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya ketika terjadi tindakan penyelewengan terhadap anggaran negara media mengungkapkan ke publik dan mempengaruhi lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan secara hukum. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan peranan media terlihat pada keefektifannya dalam memberikan pemahaman atau pendidikan politik terhadap masyarakat terkait dengan implementasi berbagai produk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Diketahui bahwa para pejabat politik dan pemerintah atau tokoh nasional yang aktif menggunakan media social di Twitter per April 2013 serta jumlah pengikutnya berturut-turut adalah Presiden Joko Widodo dengan 482.288 orang pengikut, Dahlan Iskan 348.140, Anis Wasden 209.923, Prabowo Subianto 150.124.

BAB.III

PENDAPAT UMUM DAN POLING

1. Perkembangan Pendapat Umum

Pendapat umum modern (modern public opinion) baru di mulai menjelang berakhirnya abad ke-19, ketika surat kabar New York Herald melakukan interviu kepada sejumlah penduduk kota untuk memprediksi hasil pemilihan walikota New York, lalu disusul surat kabar di Chicago Lois Amerika Serikat pada 1908 Penelitian pasar tentang perilaku konsumen juga di lakukan pada 1930 pada saat resesi melanda Amerika Serikat. Banyaknya tuntutan masyarakat sebagai bentuk perwujudan pendapat umum, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Semangat demokrasi yang semakin kuat dan mengalir tanpa batas-batas negara.
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat yang makin tinggi dan makin kritis.
3. Perkembangan teknologi komunikasi yang makin terbuka misalnya tv, surat kabar dan internet sehingga setiap orang makin mudah mendapatkan informasi
4. Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan di bidang ekonomi
5. Lembaga pemerintahan yang memerlukan citra positif dan dukungan dari masyarakat atas kebijakn atau keputusan yang diambil.
6. Perkembangan komunikasi antar bangsa dalam rangka kerja saam internasional, baik dalam bentuk bilateral, maupun multi lateral
7. Peranan kelompok-kelompok penekan dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat , mislanya perlindungan dan pelestarian alam,

pengawasan legislatif dan eksekutif (parlement and government watch), gerakan moral anti korupsi dan sebagainya.

8. Setiap negara berusaha menarik pendapat umum dengan citra yang baik dalam rangka menarik para investor untuk menanamkan modalnya maupun untuk kepentingan pariwisata.

2.Pengertian Pendapat Umum (Publik Opinien)

Berbagai pengertian mengenai pendapat umum adalah sebagai berikut :

1. Berita atau informasi yang banyak di permasalahan oleh masyarakat
2. Pendapat mayoritas penduduk
3. Pikiran orang banyak yang menjadi bahan perdebatan
4. Pendapat orang banyak yang dikumpulkan menjadi satu setelah di musyawarakan
5. Apa yang dipikirkan oleh anggota masyarakat disampaikan lewat media komunikasi
6. Pendapat orang banyak yang disampaikan untuk kepentingan bersama.

Menurut Leonard W. Doob, bahwa pendapat umum mengacu pada sikap masyarakat tentang suatu isujia mereka adalah anggota dan kelompok social yang sama. Sedangkan menurut Allport bahwa pendapat-pendapat pribadi jikalau-hal yang diekpresikan itu ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah atau politik, sebaba tidak semua pernyataan ekspresi pribadi memiliki kaitan dengan politik. Menurut Bernad Henesay bahwa pendapat umum adalah kompleks preferensi yang dinatakan sejumlah orang tertntu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum.

Dari berbagai pendapat tentang pendapat umum itu, secara substantive dapat dipahami bahwa :

1. Adanya isu yang diawali ketidak sepakatan yakni ada yang pro dan ada yang kontra.
2. Isu melahirkan dua bentuk masyarakat, bagi yang peduli pada isu itu lalu membuat pendapat, sedangkan masyarakat yang tidak perduli lalu diam.
3. Pendapat dinyatakan dalam bentuk verbal
4. Ada kelompok kolektivitas terlibat, namun sifatnya tidak permanen.

Dengan melihat pada berbagai pendapat di atas maka dapat dikomunikasikan bahwa pendapat umum ialah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk kalau menjadi bahan pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (elit) menggunakan pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota masyarakat.

Menurut Leonard W. Doob bahwa suatu isu baru dapat dikatakan pendapat umum setelah masyarakat menyatakan pendapatnya. Sepanjang pendapat itu sifatnya orang perorang, maka ia baru menjadi pendapat pribadi. Tetapi pendapat pribadi tidak bisa dipisahkan dengan pendapat umum, sebab pendapat dibangun berdasarkan pendapat pribadi terhadap isu yang minati oleh orang banyak. Contoh isu pendapat umum yang pernah menjadi pendapat umum yang berkembang di Indonesia adalah isu poligami yang disampaikan oleh Aa Gym. Dipenghujung tahun 2006. Keputusan untuk melakukan poligami telah menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sehingga memunculkan protes dan kritik

terhadap perlunya perubahan terhadap undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 10 tentang perkawinan.

Manfaat pendapat Umum adalah sebagai berikut :

1. Ada rasa ingin tahu tentang orang lain, karena mereka jadi sasaran usaha. Untuk itu perlu diketahui pendapat, saram, keinginan-keinginan mereka untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Keinginan untuk memahami system politik , apakah negara itu memiliki kebebasan dalam berpendapat atau tidak. Sebuah negara yang mengaunut system demokrasi akan memberi keluasaan bagi setiap orang untuk menyatakan keinginan dan pendapatnya.
3. Untuk menadapatkan dukungan publik dalam bentuk pemberian suara dalam pemliu.
4. Untuk mmberikan masukan terhadap pembuatan kebijakan publik.

Seorang petugas yang bekerja untuk menganalisis pendapat umum berkewajiban untuk :

1. Mengawasi dan membaca pendapat masyarakat yang terdapy dalam media masa
2. Menganilisi dan menilai pendapat masyarakat tersebut
3. Mempredeski aliran pendapt itu
4. Menyampaikan saran kepada pemimpin tantang cara-cara mengendalikan pendapat umum yang negatif
5. Menciptakan pendapat umum (citra) positif terhadap organiassi

3. Proses pembentukan pendapat

1. Latar Belakang Sejarah.

Pada umumnya latar belakang sejarah kurang mempengaruhi sikap atau pendapat seseorang. Latar belakang sejarah biasanya hanya mempengaruhi sifat-sifat dan psikologis seseorang, misalnya ia menjadi kaya karena pengalaman hidupnya pernah menderita waktu kanak-kanak. Bisa juga ia jadi tentara karena orang tuanya dibunuh oleh gerombolan.

2. Faktor Biologis.

Seperti laki-laki dan perempuan menunjukkan sikap yang berbeda dalam banyak hal. Perempuan secara fisik lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki otot tubuh yang lebih kuat. Karena itu perempuan lebih bersifat defensif dan kurang agresif. Kondisi tampaknya terbawa dalam bersikap dan memberi pendapat, yakni perempuan pada umumnya cenderung mencari situasi yang lebih aman daripada hal-hal yang mengandung resiko.

3. Faktor Sosial.

Kedudukan seseorang dalam masyarakat memberi banyak pengaruh pada sikap atau pendapatnya. Seorang pegawai kesehatan, guru, dan pamongpraja, jabatan, dan juga kekayaan menjadi status sosial. Kalangan intelektual seperti professor, doctor, dan pejabat pemerintah selalu menjadi sasaran media untuk dimintai pendapatnya terhadap suatu isu, mereka menjadi sumber berita media massa.

4.Faktor Psikologis

. Para pakar psikologis menilai bahwa watak seseorang mempengaruhi sikap dan pendapatnya terhadap suatu isu. Watak seseorang menunjukkan kepribadiannya yang pada dasarnya menjadi sikapnya. Misalnya sikap untuk mengisolasi diri, terbuka, liberal, atau demokrasi dsb.

5.Isu dan Situasi.

Hal ini turut mempengaruhi sikap dan pendapat seseorang. Misalnya suksesi presiden akan menarik perhatian para politisi, cendekiawan dan pemuda. Pada kondisi ini orang cenderung memberikan pendapat tentang calon presiden karena karena menyangkut nasib seluruh warga negara tersebut.

6.Sikap

Sikap tidak dibawa lahir melainkan hasil pengalaman dan belajar. Sikap biasanya diartikan kecenderungan seseorang untuk berpikir, bersuara atau bertindak terhadap suatu isu. Sikap terbentuk karena hasil rangsangan dari luar (stimuli) yang telah diolah manusia dalam dirinya sesuai dengan hasil pendidikannya, pengalamannya, perasaannya. Sikap dapat dibagi atas beberapa macam, yakni sikap positif, dan sikap negatif, tidak netral dan netral, tidak bersikap apa-apa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan umumnya manusia suka memberikan perhatian pada isu atau kejadian baik hal itu terjadi didalam maupun di luar lingkungannya. Terhadap suatu isu kemungkinan sekelompok orang memberikan dukungan yang kuat sekelompok lain menentang dan yang lain mengambil jalan tengah, ataukah sekaligus bersikap pasif. Dengan demikian sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan orang untuk memikirkan suatu masalah. Apakah hal itu mereka dukung, netral atau menentang.

Pendapat

Pendapat yang dinyatakan seseorang biasanya berdasarkan sikapnya. Sikap kemudian menjelma menjadi pendapat umum yang dipengaruhi oleh pengetahuan, budaya dan kepercayaan yang dianut seseorang. Prilaku budaya dan kepercayaan terhadap agama misalnya adalah suatu hal yang tidak mudah diubah. Sebab hal itu didasarkan pada kebiasaan yang sudah turun temurun dan keyakinan yang telah diterimanya sebagai suatu kebenaran dari Allah SWT. Atau Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu seseorang yang ingin membentuk dan mengubah pendapat seseorang perlu memahami sikapnya. Dalam praktek komunikasi, usaha untuk membentuk dan mengubah pendapat seseorang biasanya diawali dengan mencoba memberikan wawasan untuk mempengaruhi sikapnya. Sikap lebih sulit dirubah daripada pendapat, kalau hal ini terkait dengan norma, pengetahuan, kepercayaan, agama, dll yang tumbuh dalam masyarakat.

4. Tipe Pendapat Umum

Pendapat umum dapat dibedakan atas dua macam yaitu pendapat yang sudah dinyatakan dan pendapat yang belum dinyatakan. Pendapat umum dinyatakan berpotensi jika suatu dinyatakan dan mengkristal sebagai suatu fakta atau realitas, sedangkan pendapat umum yang laten adalah pendapat umum yang belum mengkristal dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembentukannya. Tetapi bisa jadi suatu pendapat sudah tersebar dalam bentuk desas-desusu sebelum suatu peristiwa terjadi.

5. Sifat Pendapat Umum

Pendapat umum pada dasarnya memiliki lima macam sifat yaitu sebagai berikut :

1. Sifat penyederhanaan (misalnya pendapat tokoh masyarakat adalah pendapat umum)
2. Sifat labil (mudah berubah). Menjelang perang dunia kedua Presiden Roosevelt mengatakan agar Amerika tidak boleh berpangku tangan dan mengisolasi diri, Karena hal itu berbahaya, sementara masyarakat menginginkan agar Amerika Serikat mengisolasi diri dan tidak mencampuri urusan negara lain. Tetapi ketika Jepang menyerang Pearl Harbour, semua orang Amerika tersentuh dan baru sadar akan bahaya yang mengancam kedaulatan dan reputasi AS. Hal yang sama ketika Indonesia di ingatkan oleh AS tentang terorisme. Pendapat umum menyalahkan AS bahwa isu buatan AS sendiri, termasuk ada petinggi negara menyaksikan hal itu. Dua bulan sesudah itu bom meledak di Bali dengan memakan banyak korban orang asing. Akibatnya tercipta pendapat umum secara global, bahwa Indonesia merupakan negara yang kurang aman.
3. Sifat aktualitas, baru dan hangat, menurut Praxe dan Hagemen, ada tiga macam aktualitas primer (suatu kejadian cepat diberitakan), aktualitas sekunder (masa lampau tapi masih punya nilai aktualitas, sejarah,), aktualitas tersier.
4. Sifat umum (universalitas), ialah pendapat yang dinyatakan dengan mewakili pendapat masyarakat luas.

5. Sifat Affinita, bahwa yang dibicarakan oleh publik selalu dekat dengan isu yang berkembang di masyarakat.

Selain itu juga terdapat sifat pendapat umum yaitu :

1. Pendapat umum bersifat sensitive, reaktif, dan merisaukan
2. Pendapat umum peka terhadap kejadian yang sifatnya luar biasa. Jika ini terjadi pendapat umum akan goncang, tidak stabil dan mudah berubah.
3. Pendapat umum lebih banyak dipengaruhi oleh fakta kejadian dari kata-kata atau ucapan
4. Pendapat yang dikemukakan seseorang cenderung dikaitkan dengan kepentingan dirinya, dan jika kepentingan pribadi terkait, maka pendapat sering kali berubah. Sebaliknya jika hal itu tidak membawa manfaat pada dirinya, maka pendapat mudah berubah.
5. Dalam masyarakat demokrasi, pendapat umum sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan volume informasi yang dimiliki.
6. Dalam situasi yang kritis orang cenderung mencari pegangan pada orang yang bisa memimpinya. Bila mana pemimpin mereka mampu menunjukkan kewibannya, maka pemimpin akan menerima dukungan sepenuhnya. Sebaliknya jika tidak, ia akan kehilangan kepercayaan.

